

# Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional



 [jdihnindonesia](#)  [JDIH Nasional](#)  [@jdihnindonesia](#)  [JDIHN Indonesia](#)

 [bphn.jdihn.go.id](#)  [jdihn.go.id](#)



# Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional



# JDIHN

Disampaikan dalam kegiatan  
Bimbingan Teknis Pengelolaan JDIH  
di Lingkungan Provinsi Jawa Timur  
yang diselenggarakan oleh  
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

**Batu, 12 -13 November 2019**

# Drs. YASMON, M.L.S.

- TTL : Saniangbaka, Solok, Sumatera Barat, 20 Mei 1968
- NIP : 19680520 199403 1 002
- Pangkat (Gol/Ruang) : Pembina Utama Madya (IV/d)
- Pendidikan :
  - Sarjana Sastra Inggris (Drs.), Fakultas Sastra, Universitas Andalas, 1991;
  - *Master of Legal Studies (MLS), School of Law, University of Technology Sydney, Australia, 1999*
- Riwayat Jabatan :
  - Kepala Biro Perlengkapan, Kemenkumham, 09/2014-09/2015
  - Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual, Kemenkumham, 09/2015 – 07/2017
  - Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kemenkumham, 07/2017 – April 2018
  - **Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, BPHN, Mei 2018 – sekarang**
- Diklat Penjurusan : Diklatpim I Angkatan XXX Tahun 2015
- HP / WA : 08118582005 E-mail : udayasmon@gmail.com





*Sumber: Kompas.com - 24/10/2019, 11.33 WIB*

## **Jokowi Minta Menteri Kumpulkan Regulasi yang Tumpang Tindih dalam Waktu 1 Bulan**

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para menteri dan pembantunya di Kabinet Indonesia Maju untuk mengumpulkan regulasi yang tumpang tindih dan berpotensi menghambat investasi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Ini adalah rapat pertama di era Jokowi-Ma'ruf Amin.

**"Negara ini terlalu banyak regulasi dan peraturan,"** kata Jokowi.

Jokowi ingin agar ke depan aturan yang berbelit-belit bisa dipangkas.

Ini berlaku baik aturan setingkat undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, hingga peraturan daerah.

"Termasuk di daerah nanti Mendagri tolong digarisbawahi peraturan gubernur, bupati, wali kota yang masih banyak sekali tumpang tindih dengan peraturan di atasnya," kata dia.

Jokowi ingin agar setiap kementerian dan lembaga bisa cepat bekerja mengumpulkan aturan yang tumpang tindih ini. Ia bahkan memberi target satu bulan.

"Yang menghambat pelayanan terhadap masyarakat, yang menghambat investasi dunia usaha, segera kumpulkan dalam waktu sebulan ini. Nanti akan segera rapat dua minggu lagi agar kita bisa bekerja dengan cepat," kata dia.

# KERANGKA PRESENTASI

I	Sekilas Lintas Kemenkumham, BPHN & Pusat JDIHN	
II	Digital Era & Industrial Revolution 4.0	
III	Reformasi Hukum Jilid II & 5 Prioritas Kerja Kabinet Indonesia Maju	
IV	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	
V	Organisasi JDIHN	
VI	Sistem dan Aplikasi yang Dikelola	
VII	Arah Kebijakan JDIHN 2019	
VIII	Koleksi Dokumen Hukum	
IX	Pemberian Penghargaan Anggota JDIHN Terbaik	
X	Inovasi dan Promosi JDIHN	
XI	Evaluasi Pengelolaan JDIH di Provinsi Jawa Timur	

#I

---

**Sekilas Lintas  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,  
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)  
dan  
Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional**



## Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

---

1. Sekretariat Jenderal
2. Inspektorat Jenderal
3. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
4. Direktorat Jenderal Imigrasi
5. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
7. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
8. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
9. **Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)**
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
11. Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

## Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



#II

---

**DIGITAL ERA &  
INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0**

# *The Traditional Way ...*



# *The Modern Way*



Paper Document



Scanner



Transfer paper document into digital



Share paper document from one system to another .

**Old School.**



**Highly Efficient.**

**vs.**



# ICT in Figures

JAN  
2019

## DIGITAL AROUND THE WORLD IN 2019

THE ESSENTIAL HEADLINE DATA YOU NEED TO UNDERSTAND GLOBAL MOBILE, INTERNET, AND SOCIAL MEDIA USE

TOTAL  
POPULATION



**7.676**  
BILLION

URBANISATION:  
**56%**

UNIQUE  
MOBILE USERS



**5.112**  
BILLION

PENETRATION:  
**67%**

INTERNET  
USERS



**4.388**  
BILLION

PENETRATION:  
**57%**

ACTIVE SOCIAL  
MEDIA USERS



**3.484**  
BILLION

PENETRATION:  
**45%**

MOBILE SOCIAL  
MEDIA USERS



**3.256**  
BILLION

PENETRATION:  
**42%**



we  
are  
social



we  
are  
social



# ICT in Indonesia

JAN  
2019

## INDONESIA

THE ESSENTIAL HEADLINE DATA YOU NEED TO UNDERSTAND MOBILE, INTERNET, AND SOCIAL MEDIA USE



TOTAL  
POPULATION



**268.2**  
MILLION

URBANISATION:

**56%**

MOBILE  
SUBSCRIPTIONS



**355.5**  
MILLION

vs. POPULATION:

**133%**

INTERNET  
USERS



**150.0**  
MILLION

PENETRATION:

**56%**

ACTIVE SOCIAL  
MEDIA USERS



**150.0**  
MILLION

PENETRATION:

**56%**

MOBILE SOCIAL  
MEDIA USERS



**130.0**  
MILLION

PENETRATION:

**48%**

# ICT in Indonesia

JAN  
2019

## TIME SPENT WITH MEDIA

AVERAGE DAILY TIME SPENT CONSUMING AND INTERACTING WITH MEDIA [SURVEY BASED]



AVERAGE DAILY TIME  
SPENT USING THE  
INTERNET VIA ANY DEVICE



we  
are  
social

8H 36M

AVERAGE DAILY TIME  
SPENT USING SOCIAL  
MEDIA VIA ANY DEVICE



global  
web  
index

3H 26M

AVERAGE DAILY TV VIEWING TIME  
(BROADCAST, STREAMING  
AND VIDEO ON DEMAND)



2H 52M

AVERAGE DAILY TIME  
SPENT LISTENING TO  
STREAMING MUSIC



1H 22M

# INDUSTRY 4.0



Sumber Gambar : <https://www.maxmanroe.com/revolusi-industri-4-0.html>

... tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber...

# Mencari dokumen hukum ?



[peraturan.go.id](http://peraturan.go.id)

Kementerian Hukum dan HAM RI

Google



HUKUM  
ONLINE  
.COM



eCLIS!.id



Sekitar 22.500.000 hasil (0,49 detik)

## Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-u...> ▼

22 Agu 2017 - Menurut UU ini, peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota. adalah partai politik, yang ...

## [PDF] Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

[indonesia-oslo.no/.../UU\\_Nomor\\_7\\_Tahun\\_2017\\_-\\_Batang\\_Tubuh\\_-\\_Hal.\\_1-150.pdf](indonesia-oslo.no/.../UU_Nomor_7_Tahun_2017_-_Batang_Tubuh_-_Hal._1-150.pdf)

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden,. Undangl Indang. Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaL lepilihan. Umum, dan Undang-Undang Nomor ...

## [PDF] Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

[www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/138/3541.bpkp](http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/138/3541.bpkp)

d. bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-. Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang ...

## KPU Setuju Undang-Undang Pemilu Direvisi - Nasional Kompas

<https://nasional.kompas.com> > News > Nasional ▼

25 Apr 2019 - KPU sependapat untuk memformulasikan aturan baru, guna diterapkan di pemilu selanjutnya.

#III

---

**REFORMASI HUKUM JILID II**

Home / News / Nasional

## Ini Fokus Jokowi dalam Reformasi Hukum Jilid II

FABIAN JANUARIUS KUWADO

Kompas.com - 17/01/2017, 17:10 WIB



### REFORMASI HUKUM Jilid II

- 1. Penataan Regulasi**
2. Perluasan Jangkauan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Kecil
3. Membangun rasa aman di lingkungan masyarakat melalui pengembangan pemolisian masyarakat (polmas)

# Agenda Penataan Regulasi

1



Penguatan Pembentukan  
Peraturan Perundang-undangan

2



Evaluasi Seluruh Peraturan  
Perundang-undangan

3



Pembuatan Database  
Peraturan Perundang-  
undangan yang Terintegrasi

# 5 PRIORITAS KERJA JOKOWI-MA'RUF

Pelantikan Presiden & Wakil Presiden RI  
Periode 2019-2024

“**Pertama**, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita. **Kedua**, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. **Ketiga**, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. **Keempat**, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. **Kelima** adalah transformasi ekonomi.”

*Presiden Joko Widodo*  
Minggu, 20 Oktober 2019



**#BersamaIndonesiaMaju**

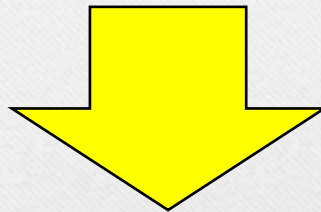
# #IV

---

## **Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)**

# **DASAR HUKUM**

**Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional**



**Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (20 Maret 2012)**

# Latar Belakang

- a. dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- b. untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi;

# Definisi

1. **Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional** yang selanjutnya disebut **JDIHN** adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;
2. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada **putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan**;

# Tujuan JDIHN

- a. Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya;
- b. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. Mengembangkan kerja sama yang efektif antar Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata-pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

# Organisasi JDIHN

- 1) Organisasi JDIHN terdiri dari :
  - a. Pusat JDIHN; dan
  - b. Anggota JDIHN
- 2) Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM merupakan Pusat JDIHN
- 3) Anggota JDIHN:
  - a. Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada:
    1. Kementerian Negara;
    2. Sekretariat Lembaga Negara;
    3. Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
    4. Pemerintah Provinsi;
    5. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
    6. Sekretariat DPRD Tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota
  - b. Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta;
  - c. Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri

# Organisasi JDIHN

- 1) Pimpinan Instansi (**Kementerian Negara, Sekretariat Lembaga Negara, LPNK, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota**) wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.
- 2) **Kementerian Negara dan Sekretariat Lembaga Negara** bertindak sebagai Pusat JDIH di lingkungannya.
- 3) **Pemerintah Provinsi** bertindak sebagai **Pusat JDIH** di wilayahnya.

## Organisasi JDIHN

Pusat JDIHN dan Anggota JDIHN wajib melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dan anggaran.

# Tugas dan Fungsi Anggota JDIHN

- 1) Anggota JDIHN bertugas untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh instansinya.
- 2) Anggota JDIHN menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan instansinya;
  - b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
  - c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya;
  - d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;
  - e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
  - f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN.

# Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Anggota JDIHN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum

# Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 2 Tahun 2013 Tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum

1. Standardisasi pengadaan dokumen hukum;
2. Standardisasi pembuatan daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
3. Standardisasi pembuatan katalog peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
4. Standardisasi pembuatan abstrak peraturan perundang-undangan;
5. Standardisasi pembuatan katalog monografi hukum;
6. Standardisasi penyusunan indeks majalah hukum;
7. Standardisasi penyusunan indeks kliping koran;
8. Standardisasi pelayanan informasi hukum;
9. Standardisasi website JDIHN;
10. Standardisasi monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIHN; dan
11. Standardisasi pelaporan penyelenggaraan JDIHN.

**SUDAH  
TIDAK  
BERLAKU**

## **Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (10 Juni 2019)**

1. Standar pembuatan abstrak peraturan perundang-undangan;
2. Standar Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum;
3. Standar Laporan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

**BARU**

## Anggaran Kegiatan JDIHN

Anggaran kegiatan JDIHN dibebankan pada instansi masing-masing melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#V

---

*Organisasi JDIHN*

# Peta Anggota JDIH

(Kondisi : 11 November 2019)

	Jumlah	Website Utama	Website JDIH	Integrasi dgn jdihn.go.id
Kementerian (di luar Kemenkumham)	33	33	30	20
Lembaga Negara	20	20	12	5
LPNK	67	67	30	14
Pemerintah Provinsi	34	34	32	24
Pemerintah Kabupaten	416	415	316	160
Pemerintah Kota	98	98	90	49
DPRD Provinsi	34	23	2	1
DPRD Kabupaten	415	149	9	2
DPRD Kota	93	48	1	0
Perpustakaan Hukum	399	248	4	2
Lembaga Non Struktural	-	1	1	1
Unit Eselon I Kemenkumham	11	11	5	4
Kanwil Kemenkumham	33	33	33	33
<b>Total</b>	<b><u>1.654</u></b>	<b><u>1.180</u></b>	<b><u>565</u></b>	<b>315</b>
<b>Persentase</b>	<b>100%</b>	<b>71%</b>	<b>34%</b>	<b>19%</b>

#VI

---

**Sistem dan Aplikasi yang Dikelola**

[www.bphn.jdihn.go.id](http://www.bphn.jdihn.go.id)

- Website JDIH pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai Satuan Kerja
- Menggunakan Aplikasi Standar Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum (*Indonesian Legal Documentation and Information System – ILDIS*), versi 2019

# www.bphn.jdihn.go.id

Pusat Dokumentasi & dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

Portal Resmi BPHN - Kemenkumham R.I



## JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

### BERANDA

Selamat Datang Di JDIHN

### TENTANG KAMI

Seputar Profil JDIHN

### JENIS DOKUMEN HUKUM

Himpunan Dokumen Hukum Di Indonesia

### BERITA

Berita Sekitar JDIHN

### ANGGOTA JDIHN

Seputar Anggota JDIHN



Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional - BPHN

Infografis Basis Data JDIHN

Tonton nanti Bagikan

BASIS DATA JDIHN

www.jdihn.bphn.go.id

BASIS DATA NASIONAL

PETA ANGGOTA JDIH

E-REPORTING

PORTAL JDIHN

Questions?  
Chat Now!

Offline - Leave a message



“  
Lebih Dari 153604 Dokumen  
Hukum Dapat Diakses Di JDIHN”



Monografi Hukum

[Lihat Lebih Detail](#)

17,995



Artikel/Majalah Hukum

[Lihat Lebih Detail](#)

21,356



Putusan Pengadilan

[Lihat Lebih Detail](#)

1,001



Peraturan Desa

[Lihat Lebih Detail](#)

689



Staatsblad

[Lihat Lebih Detail](#)

23,837



Peraturan Perundang-undangan Pusat

[Lihat lebih detail](#)

13,982



Peraturan Kementerian

[Lihat lebih detail](#)

19,616



Lembaga Negara

[Lihat lebih detail](#)

661



Lembaga Pemerintahan Non Kementerian

[Lihat lebih detail](#)

2,251



Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Kabupaten/Kota

[Lihat lebih detail](#)

52,204

# www.jdihn.go.id

- *Portal & Search Engine* JDIHN
- Menggunakan Aplikasi Integrasi JDIHN versi 2018.
- Sebelumnya menggunakan alamat domain [www.jdihn.id](http://www.jdihn.id) dengan Aplikasi Integrasi JDIHN versi 2017

# www.jdihn.go.id

- INTEGRASI ULANG bagi Anggota JDIHN yang sebelumnya sudah terintegrasi dengan **www.jdihn.id**
- Metadata yang lebih lengkap
- Perlu Perubahan *Application Programming Interface* (API)
- Aplikasi Integrasi JDIHN versi 2018 -- > Khazanah Dokumen Hukum Indonesia

# Portal JDIHN

## jdihn.go.id

 **JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL**

[Tentang JDIHN](#) ▾ [Organisasi JDIHN](#) [Agenda](#) [Berita](#) [Galeri Foto / Video](#) [Ruang Unduh](#) [FAQ](#) [Login](#)

## Khazanah Dokumen Hukum Indonesia

Temukan literatur hukum yang kamu cari disini.

ARTIKEL  
HUKUM

PENELITIAN  
HUKUM

PERATURAN  
PERUNDANG-  
UNDANG

PUTUSAN  
PENGADILAN

Di Sini

NASKAH  
AKADEMIK

Pencarian  

Tipe Dokumen ▾

Jenis Dokumen ▾

Berdasarkan No Dokumen

Masukkan Tahun

JDIHN BPHN ▾

Status 



# Portal JDIHN

## jdihn.go.id

Anda dapat menemukan 229.524 Dokumen Hukum

Meliputi :

30.785 Produk Hukum Tingkat Pusat

136.549 Produk Hukum Tingkat Daerah

13.310 Monografi Hukum

26.280 Artikel Hukum/Jurnal

3.075 Putusan  
PENGADILAN

19.525 Produk Hukum Era Kolonial

ARTIKEL  
HUKUM

NASKAH  
AKADEMIK

Pencarian

Kata Kunci Pencarian



Tipe Dokumen

Jenis Dokumen

Berdasarkan No Dokumen

Masukkan Tahun

Instansi

Status

30.785



Produk Hukum Tingkat Pusat

136.549



Produk Hukum Tingkat Daerah

19.525



Produk Hukum Era Kolonial

13.310



Monografi Hukum

26.280



Artikel / Majalah Hukum

3.075



Yurisprudensi / Putusan

## I.L.D.I.S.

- Platform: PHP 5.6
- Database: MySQL
- Pengolahan Dokumentasi dan Informasi Hukum
- Versi 1.0 (2018)
- Memiliki 2 modul:
  - Website JDIH --> *Front-end*
  - Aplikasi standar untuk pengolahan data dokumentasi hukum → *Back-end*



## E-REPORTING

Welcome. Please login.

Username

Password

LOGIN

Keep me sign in [Forgot Password?](#)

<http://e-report.jdihn.go.id/>

- Setiap Anggota JDIHN harus menyampaikan laporan pelaksanaan / pengelolaan JDIH kepada Pusat JDIHN
- Laporan disampaikan pada setiap Bulan Desember
- Mekanisme pelaporan secara manual (mengirimkan berkas hardcopy ke Pusat JDIHN) telah diperbarui dengan pelaporan secara elektronik melalui aplikasi e-Reporting

# Keunggulan JDIHN

---

- ✓ *Portal Dokumen Hukum Nasional*
- ✓ *Memiliki Sumber Informasi yang Jelas*
- ✓ *Memiliki jumlah dan jenis dokumen dokumen paling lengkap*
- ✓ *Tidak Berbayar*

#VII

---

**Arah Kebijakan 2019**

## Arah Kebijakan Pengembangan JDIHN 2019

1. Percepatan Partisipasi Anggota JDIHN;
2. Sosialisasi Aplikasi ILDIS dan Aplikasi Integrasi JDIHN;
3. Penyempurnaan Aplikasi Berbasis Android & OS
4. Pengembangan / penyempurnaan Sistem JDIHN
5. Penguatan SDM
6. Kelengkapan Koleksi Dokumen Hukum untuk Mewujudkan Basis Data Nasional Dokumen Hukum
7. Kampanye / Promosi JDIHN
8. *Acknowledgement & Reward*

## Arah Kebijakan Pengembangan JDIHN 2019

9. Penyelarasan JDIHN dengan SPBE (Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
10. Penyelarasan JDIH dengan kebijakan Satu Data Indonesia (Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia)
11. Jalinan Kerja Sama dengan Badan Saiber dan Sandi Negara (BSSN) terkait Penggunaan Tanda Tangan Digital (Digital Signature) atau Sertifikasi Elektronik pada Dokumen Hukum

# JDIHN & SPBE

- Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Indikator 15 : Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
- Indikator 33 : Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum

# JDIHN & SATU DATA INDONESIA

- Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- BPHN sebagai Pusat JDIHN akan menjajagi kemungkinan untuk menjadi Walidata untuk Dokumen Hukum
- Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data

#VIII

---

**Koleksi Dokumen Hukum**

# KOLEKSI DOKUMEN HUKUM

[bphn.jdih.go.id](http://bphn.jdih.go.id)

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	Peraturan Perundang-undangan Pusat	13.977
2	Peraturan Kementerian	19.618
3	Peraturan Lembaga Negara	661
4	Peraturan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian	2.251
5	Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Kabupaten/ Kota	51.939
6	Peraturan Desa	689
7	Putusan	1.001
8	Monografi Hukum	17.989
9	Artikel/Majalah Hukum	21.331
10	Staatsblad	23.837
<b>TOTAL</b>		<b>153.293</b>

# KOLEKSI DOKUMEN HUKUM

[jdihn.go.id](http://jdihn.go.id)

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	Produk Hukum Tingkat Pusat	32.574
2	Produk Hukum Tingkat Daerah	138.126
3	Produk Hukum Era Kolonial	19.525
4	Monografi Hukum	13.310
5	Artikel / Majalah Hukum	26.280
6	Yurisprudensi / Putusan	3.075
TOTAL		232.890

Kondisi : 11 November 2019

# CATATAN PENTING

---

- *Informasi yang diunggah dan dikelola dalam JDIIH adalah informasi yang bersifat terbuka untuk publik, bukan informasi yang dikecualikan*

# #IX

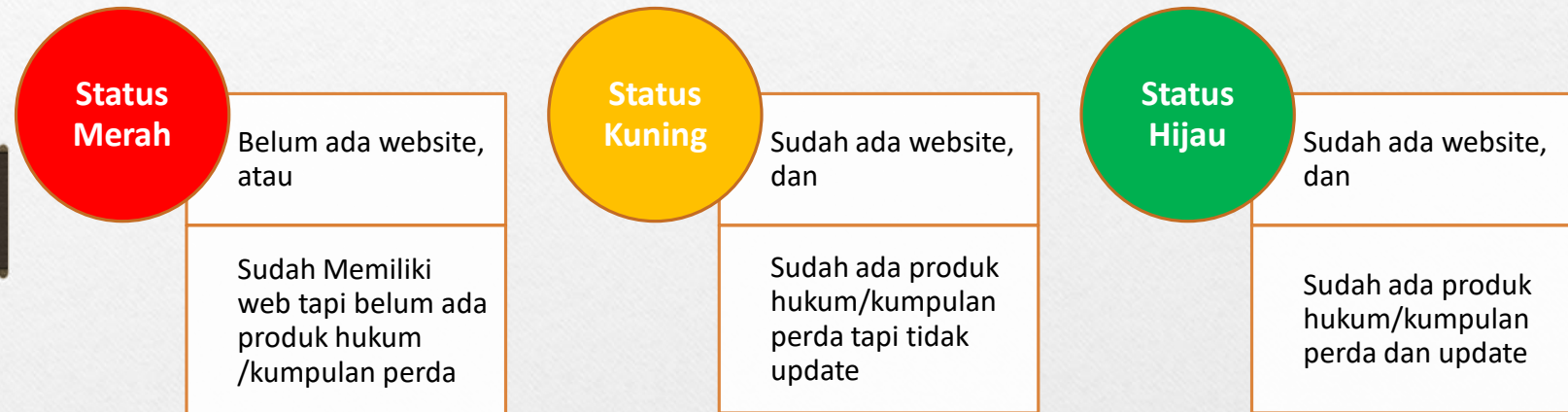
---

**Pemberian Penghargaan bagi  
Anggota JDIHN Terbaik**

# Penghargaan Anggota JDIH 2014

## A. Kriteria

1. Pengiriman laporan pelaksanaan JDIHN
2. Koordinasi dan Kerjasama JDIHN (Bimtek dan Sosialisasi)
3. Evaluasi Upload data produk hukum dalam website JDIH



## B. Penerima Penghargaan

1. Biro Hukum dan Humas MA
2. Biro Hukum Kementerian Keuangan
3. Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
4. Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
5. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi
6. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
7. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

# Penghargaan Anggota JDIH 2015

## **A. Kriteria Penghargaan**

1. Evaluasi Data peraturan dalam website anggota JDIHN
  2. Laporan
  3. Koordinasi Kerjasama JDIHN dengan Pusat dan sesama anggota JDIHN
- 

## **B. Penerima Penghargaan Tingkat Kementerian/Lembaga Negara**

1. Kementerian Keuangan RI
2. Badan Pemeriksa Keuangan RI
3. Kementerian Ketenagakerjaan RI

## **C. Penerima Penghargaan Tingkat Provinsi**

1. Provinsi Kalimantan Selatan
2. Provinsi Jawa Tengah
3. Provinsi Kepulauan Riau

## **D. Penerima Penghargaan Tingkat Kabupaten/Kota Wilayah Indonesia Bagian Barat**

1. Bagian Hukum Setda Kota Surabaya
2. Bagian Hukum Setda Kota Tangerang
3. Bagian Hukum Setda Kota Batam

## **E. Penerima Penghargaan Tingkat Kabupaten/Kota Wilayah Indonesia Bagian Tengah**

1. Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Polewali Mandar
3. Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem

# Penghargaan Anggota JDIH 2016

## **Kriteria Penghargaan**

Dalam periode ketiga evaluasi dan penilaian terhadap anggota JDIH tingkat Pusat dan Provinsi berdasarkan pada aspek pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi diantaranya aspek segi penggunaan, penyajian data, grafik desain, kompatibilitas, system navigasi, loading time dan functionality

---

## **A. Penerima Penghargaan Tingkat Kementerian/Lembaga Negara**

1. Kementerian Ketenagakerjaan dari segi Usability
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika dari Segi Navigasi
3. Kementerian Keuangan dari segi Konten

## **B. Penerima Penghargaan Tingkat Provinsi**

1. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dari segi Usability
2. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dari segi Navigasi
3. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dari Segi Konten

# Penghargaan Anggota JDIH 2017

## Kriteria Penghargaan

Dalam periode keempat ini sistem penilaian dilihat dari 6 aspek pengelolaan JDIHN, Laporan pengelolaan JDIHN, Evaluasi Website, dan terintegrasinya website JDIH anggota jaringan ke JDIHN.ID

---

### A. Penerima Penghargaan Tingkat Kementerian/Lembaga Negara

1. Badan Pemeriksa Keuangan RI
2. Kementerian Keuangan RI
3. Kementerian Ketenagakerjaan RI
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
5. Kementerian BUMN RI

### B. Penerima Penghargaan Tingkat Provinsi

1. Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah
2. Biro Hukum dan HAM Provinsi Bali
3. Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat
4. Biro Hukum Provinsi Banten
5. Biro Hukum Provinsi Jawa Timur

### C. Penerima Penghargaan Tingkat Kabupaten/Kota

1. Bagian Hukum Kota Tangerang
2. Bagian Hukum Kota Tasikmalaya
3. Bagian Hukum Kabupaten Wonosobo
4. Bagian Hukum Kabupaten Sleman
5. Bagian Hukum Kabupaten Fakfak Barat

# Anggota JDIH Terbaik 2018

## **I. Tingkat Kementerian / Lembaga**

1. Biro Hukum Kementerian Keuangan RI
2. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum, BPK RI
3. Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja RI

## **II. Tingkat Provinsi**

1. Biro Hukum dan HAM, Sekretariat Daerah, Provinsi Jawa Barat
2. Biro Hukum, Sekretariat Daerah, Provinsi Jawa Tengah
3. Biro Hukum, Sekretariat Daerah, Provinsi Bali

## **III. Tingkat Kabupaten**

1. Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Jawa Timur
2. Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, DIY
3. Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, Jawa Tengah

## **IV. Tingkat Kota**

1. Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Surakarta
2. Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
3. Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Bandung

# Pengelola JDIH Terbaik Tahun 2018 di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Keputusan Menkumham No M.HH-32.KP.08.05 Tahun 2018

## **A. Unit Eselon I**

- I. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
- II. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

## **B. Kantor Wilayah (Kategori Kecil)**

- I. Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung
- II. Kantor Wilayah Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta
- III. Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah

## **C. Kantor Wilayah (Kategori Sedang)**

- I. Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan
- II. Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan
- III. Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh

## **D. Kantor Wilayah (Kategori Besar)**

- I. Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat
- II. Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur
- III. Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara

# Anggota JDIH Terbaik 2019

- ✓ **JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Kementerian**
  - Terbaik I : Kementerian Keuangan
  - Terbaik II : Kementerian Ketenagakerjaan
  - Terbaik III : Kementerian Badan Usaha Milik Negara
  - Terbaik Harapan I : Kementerian Komunikasi dan Informatika
  - Terbaik Harapan II: Kementerian Pariwisata
- ✓ **JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Lembaga Negara**
  - Terbaik I : Badan Pemeriksa Keuangan
  - Terbaik II : Dewan Perwakilan Daerah
- ✓ **JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Lembaga Pemerintah Non Kementerian**
  - Terbaik I : Badan Informasi Geospasial
  - Terbaik II : Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
  - Terbaik III : Badan Tenaga Nuklir Nasional
- ✓ **JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Lembaga Non Struktural**
  - Komisi Pemilihan Umum

# Anggota JDIH Terbaik 2019

- ✓ **JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Pemerintah Provinsi Besar dengan Jumlah Anggota > 30 Anggota**
  - Terbaik I : Provinsi Jawa Tengah
  - Terbaik II : Provinsi Jawa Barat
  - Terbaik III : Provinsi Jawa Timur
- ✓ **JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Pemerintah Provinsi Kecil dengan Jumlah Anggota < 30 Anggota**
  - Terbaik I : Provinsi Bali
  - Terbaik II : Provinsi Kalimantan Selatan
  - Terbaik III : Provinsi Riau

# Anggota JDIH Terbaik 2019

## ✓ JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Kabupaten

- Terbaik I : Kabupaten Tuban
- Terbaik II : Kabupaten Semarang
- Terbaik III : Kabupaten Garut
- Terbaik Harapan I: Kabupaten Banyuwangi
- Terbaik Harapan II: Kabupaten Bandung
- Terbaik Harapan III: Kabupaten Pematang

## ✓ JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Kota

- Terbaik I : Kota Sukabumi
- Terbaik II : Kota Surakarta
- Terbaik III : Kota Bandung
- Terbaik Harapan I : Kota Ambon
- Terbaik Harapan II : Kota Batam

# Anggota JDIH Terbaik 2019

- ✓ **JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Sekretariat DPRD**

**Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi**

- ✓ **JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Perpustakaan Hukum**

- **Universitas Pamulang**

# Anggota JDIH Terbaik 2019

- ✓ JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN dengan Metadata Terlengkap
  - **Provinsi Aceh**
- ✓ JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN dengan Aplikasi Android Terbaik
  - **Kementerian Keuangan**
- ✓ JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN dengan Laman Internet JDIH Dwibahasa
  - **Kementerian Badan Usaha Milik Negara**
- ✓ JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN dengan Inovasi Sosialisasi / Kampanye Teraktif
  - **Kabupaten Tuban**

# *Kriteria Penilaian Anggota JDIHN*

**#LAPORAN**

**#INTEGRASI**

1. Organisasi,
2. Sumber Daya Manusia,
3. Koleksi Dokumen Hukum,
4. Teknis pengelolaan,
5. Sarana prasarana,
6. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi,
7. **Inovasi**

# **Penilaian Anggota JDIHN**

---

**Tahun 2019**

# #1. ORGANISASI

---

- Dasar Hukum
- Struktur Organisasi
- SK Tim Teknis
- Visi & Misi
- Kontak Person

## #2. SUMBER DAYA MANUSIA

---

- Data Pengelola JDIH
- Melaksanakan Pelatihan
- Mengikuti Pelatihan
- Melakukan Study Banding
- Melakukan Koordinasi & Konsultasi

## #3. KOLEKSI DOKUMEN HUKUM

---

- Peraturan Perundang-Undangan
- Non Peraturan Perundang-Undangan
- Dokumen Langka

## #4. TEKNIS PENGELOLAAN

---

- Penyampaian Laporan
- SOP Pengelolaan JDIH
- Standar Metadata
- Abstrak

# #5. SARANA & PRASARANA

---

- Meubelair
- Alat Pengolah Data
- Akses Internet
- Sarana Umum
- Ruang Kerja
- Ruang Koleksi
- Ruang Baca

## #6. PEMANFAATAN T.I.K.

---

- Alamat Domain Sesuai Standar
- Alamat Domain Melekat pada Domain Utama
- Website JDIH sudah terintegrasi
- Memiliki Perangkat Server Sendiri
- Kelengkapan Konten

# #7. INOVASI & PROMOSI

---

- Aplikasi Mobile (Android/IOS)
- Fitur Tambahan di luar Website Website
- Penguatan Keanggotaan
- Sosialisasi JDIHN Melalui Media Massa/Cetak
- Sosialisasi JDIHN Melalui Media Sosial/Elektronik

#X

---

**Inovasi & Promosi  
JDIHN**

# Media Promosi JDIHN



[www.jdihn.go.id](http://www.jdihn.go.id)



@jdihnindonesia



JDIH Nasional



@jdihnindonesia



jdihn indonesia



*Instagram*



*Facebook*



*Twitter*



*You Tube*

# Berbagai Inovasi dalam Pengelolaan JDIH

---

- Aplikasi JDIH Berbasis Android & IOS
- Promosi JDIH melalui Berbagai Akun Media Sosial
- Kios JDIH, Pojok JDIH
- Promosi JDIH melalui Berbagai Media (Videotron, Lampu Lalu Lintas, dll)
- Website JDIH dalam versi Bahasa Inggris
- Penggunaan *Digital Signature* pada Dokumen Hukum
- Majalah JDIH

# *Peresmian Kios JDIH Kabupaten Garut*



# Pengelolaan JDIH oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo



# Pengelolaan JDIH oleh Pemerintah Kota Sukabumi



# #XI

---

**EVALUASI PENGELOLAAN  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM  
DI LINGKUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR**

# Data Anggota JDIHN Provinsi Jawa Timur

Instansi	Jumlah	Website JDIH	Integrasi dgn jdihn.go.id
Biro Hukum Pemerintah Provinsi	1	1	1
Bagian Hukum Kabupaten	29	29	6
Bagian Hukum Kota	9	9	2
Bagian Hukum DPRD Provinsi	1	-	-
Bagian Hukum DPRD Kabupaten	29	-	-
Bagian Hukum DPRD Kota	9	-	-
Perpustakaan Hukum	64	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>142</b>	<b>39</b>	<b>9</b>

# Evaluasi Pengelolaan JDIH di Lingkungan Provinsi Jawa Timur ( 12 November 2019 )

No	Instansi	Kategori Anggota	Website JDIH	INTEGRASI dgn jdihn.go.id	KETERANGAN
1	Provinsi Jawa Timur	Provinsi	<a href="http://jdih.jatimprov.go.id/">http://jdih.jatimprov.go.id/</a>	Sudah	
2	Kabupaten Bangkalan	Kabupaten	<a href="http://jdih.bangkalankab.go.id/">http://jdih.bangkalankab.go.id/</a>	-	
3	Kabupaten Banyuwangi	Kabupaten	<a href="http://jdih.banyuwangikab.go.id/">http://jdih.banyuwangikab.go.id/</a>	Sudah	
4	Kabupaten Blitar	Kabupaten	<a href="http://jdih.blitarkab.go.id/">http://jdih.blitarkab.go.id/</a>	-	
5	Kabupaten Bojonegoro	Kabupaten	<a href="http://kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/">http://kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/</a>	-	
6	Kabupaten Bondowoso	Kabupaten	<a href="http://bondowosokab.jdih.jatimprov.go.id/">http://bondowosokab.jdih.jatimprov.go.id/</a>	-	
7	Kabupaten Gresik	Kabupaten	<a href="http://jdih.gresikkab.go.id/">http://jdih.gresikkab.go.id/</a>	Sudah	
8	Kabupaten Jember	Kabupaten	<a href="http://kabjember.jdih.jatimprov.go.id/">http://kabjember.jdih.jatimprov.go.id/</a>	-	
9	Kabupaten Jombang	Kabupaten	<a href="http://jdih.jombangkab.go.id/">http://jdih.jombangkab.go.id/</a>	Sudah	
10	Kabupaten Kediri	Kabupaten	<a href="http://jdih.kedirikab.go.id">http://jdih.kedirikab.go.id</a>	-	

# Evaluasi Pengelolaan JDIH di Lingkungan Provinsi Jawa Timur ( 12 November 2019 )

No	Instansi	Kategori Anggota	Website JDIH	INTEGRASI dgn jdihn.go.id	KETERANGAN
11	Kabupaten Lamongan	Kabupaten	<a href="https://kablamongan.jdih.jatimprov.go.id/">https://kablamongan.jdih.jatimprov.go.id/</a>	-	
12	Kabupaten Lumajang	Kabupaten	<a href="https://jdih.lumajangkab.go.id/">https://jdih.lumajangkab.go.id/</a>	Sudah	
13	Kabupaten Madiun	Kabupaten	<a href="http://jdih.madiunkab.go.id/">http://jdih.madiunkab.go.id/</a>	-	
14	Kabupaten Magetan	Kabupaten	<a href="https://jdih.magetan.go.id/">https://jdih.magetan.go.id/</a>	-	
15	Kabupaten Malang	Kabupaten	<a href="http://jdih.malangkab.go.id/">http://jdih.malangkab.go.id/</a>	-	
16	Kabupaten Mojokerto	Kabupaten	<a href="https://kabmojokerto.jdih.jatimprov.go.id/">https://kabmojokerto.jdih.jatimprov.go.id/</a>	-	
17	Kabupaten Nganjuk	Kabupaten	<a href="https://kabnganjuk.jdih.jatimprov.go.id/">https://kabnganjuk.jdih.jatimprov.go.id/</a>	-	
18	Kabupaten Ngawi	Kabupaten	<a href="http://kabngawi.jdih.jatimprov.go.id/">http://kabngawi.jdih.jatimprov.go.id/</a>	-	
19	Kabupaten Pacitan	Kabupaten	<a href="https://kabpacitan.jdih.jatimprov.go.id/">https://kabpacitan.jdih.jatimprov.go.id/</a>	-	
20	Kabupaten Pamekasan	Kabupaten	<a href="https://jdih.pamekasankab.go.id/">https://jdih.pamekasankab.go.id/</a>	-	

# Evaluasi Pengelolaan JDIH di Lingkungan Provinsi Jawa Timur ( 12 November 2019 )

No	Instansi	Kategori Anggota	Website JDIH	INTEGRASI dgn jdihn.go.id	KETERANGAN
21	Kabupaten Pasuruan	Kabupaten	<a href="https://jdih.pasuruankab.go.id/">https://jdih.pasuruankab.go.id/</a>	-	
22	Kabupaten Ponorogo	Kabupaten	<a href="https://kabponorogo.jdih.jatimprov.go.id/">https://kabponorogo.jdih.jatimprov.go.id/</a>	-	
23	Kabupaten Probolinggo	Kabupaten	<a href="https://jdih.probolinggokab.go.id/">https://jdih.probolinggokab.go.id/</a>	Sudah	
24	Kabupaten Sampang	Kabupaten	<a href="http://jdih.sampangkab.go.id/">http://jdih.sampangkab.go.id/</a>	-	
25	Kabupaten Sidoarjo	Kabupaten	<a href="http://sjdih.sidoarjokab.go.id/">http://sjdih.sidoarjokab.go.id/</a>	-	
26	Kabupaten Situbondo	Kabupaten	<a href="http://jdih.situbondokab.go.id">http://jdih.situbondokab.go.id</a>	-	
27	Kabupaten Sumenep	Kabupaten	<a href="http://jdih.sumenepkab.go.id">http://jdih.sumenepkab.go.id</a>	-	
28	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten	<a href="http://jdih.trenggalekkab.go.id">http://jdih.trenggalekkab.go.id</a>	-	
29	Kabupaten Tuban	Kabupaten	<a href="http://jdih.tubankab.go.id">http://jdih.tubankab.go.id</a>	Sudah	
30	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten	<a href="http://kabtulungagung.jdih.jatimprov.go.id/">http://kabtulungagung.jdih.jatimprov.go.id/</a>	-	

# Evaluasi Pengelolaan JDIH di Lingkungan Provinsi Jawa Timur ( 12 November 2019 )

No	Instansi	Kategori Anggota	Website JDIH	INTEGRASI dgn jdihn.go.id	KETERANGAN
31	Kota Batu	Kota	<a href="http://jdih.batukota.go.id/">http://jdih.batukota.go.id/</a>	-	
32	Kota Blitar	Kota	<a href="https://jdih.blitarkota.go.id/">https://jdih.blitarkota.go.id/</a>	-	
33	Kota Kediri	Kota	<a href="http://jdih.kedirikota.go.id/">http://jdih.kedirikota.go.id/</a>	-	
34	Kota Madiun	Kota	<a href="http://jdih.madiunkota.go.id/">http://jdih.madiunkota.go.id/</a>	-	
35	Kota Malang	Kota	<a href="http://jdih.malangkota.go.id">http://jdih.malangkota.go.id</a>	Sudah	
36	Kota Mojokerto	Kota	<a href="http://jdih.mojokertokota.go.id">http://jdih.mojokertokota.go.id</a>	Sudah	
37	Kota Pasuruan	Kota	<a href="http://jdih.pasuruankota.go.id/">http://jdih.pasuruankota.go.id/</a>	-	
38	Kota Probolinggo	Kota	<a href="http://jdih.probolinggokota.go.id/">http://jdih.probolinggokota.go.id/</a>	-	
39	Kota Surabaya	Kota	<a href="https://jdih.surabaya.go.id/">https://jdih.surabaya.go.id/</a>	-	
40	DPRD Provinsi Jawa Timur	DPRD Provinsi	-	-	

# Evaluasi Pengelolaan JDIH di Lingkungan Provinsi Jawa Timur ( 12 November 2019 )

No	Instansi	Kategori Anggota	Website JDIH	INTEGRASI dgn jdihn.go.id	KETERANGAN
41	DPRD Kabupaten Bangkalan	DPRD Kabupaten	-	-	-
42	DPRD Kabupaten Banyuwangi	DPRD Kabupaten	-	-	-
43	DPRD Kabupaten Blitar	DPRD Kabupaten	-	-	-
44	DPRD Kabupaten Bojonegoro	DPRD Kabupaten	-	-	-
45	DPRD Kabupaten Bondowoso	DPRD Kabupaten	-	-	-
46	DPRD Kabupaten Gresik	DPRD Kabupaten	-	-	-
47	DPRD Kabupaten Jember	DPRD Kabupaten	-	-	-
48	DPRD Kabupaten Jombang	DPRD Kabupaten	-	-	-
49	DPRD Kabupaten Kediri	DPRD Kabupaten	-	-	-
50	DPRD Kabupaten Lamongan	DPRD Kabupaten	-	-	-

# Evaluasi Pengelolaan JDIH di Lingkungan Provinsi Jawa Timur ( 12 November 2019 )

No	Instansi	Kategori Anggota	Website JDIH	INTEGRASI dgn jdihn.go.id	KETERANGAN
51	DPRD Kabupaten Lumajang	DPRD Kabupaten	-	-	-
52	DPRD Kabupaten Madiun	DPRD Kabupaten	-	-	-
53	DPRD Kabupaten Magetan	DPRD Kabupaten	-	-	-
54	DPRD Kabupaten Malang	DPRD Kabupaten	-	-	-
55	DPRD Kabupaten Mojokerto	DPRD Kabupaten	-	-	-
56	DPRD Kabupaten Nganjuk	DPRD Kabupaten	-	-	-
57	DPRD Kabupaten Ngawi	DPRD Kabupaten	-	-	-
58	DPRD Kabupaten Pacitan	DPRD Kabupaten	-	-	-
59	DPRD Kabupaten Pamekasan	DPRD Kabupaten	-	-	-
60	DPRD Kabupaten Pasuruan	DPRD Kabupaten	-	-	-

# Evaluasi Pengelolaan JDIH di Lingkungan Provinsi Jawa Timur ( 12 November 2019 )

No	Instansi	Kategori Anggota	Website JDIH	INTEGRASI dgn jdihn.go.id	KETERANGAN
61	DPRD Kabupaten Ponorogo	DPRD Kabupaten	-	-	-
62	DPRD Kabupaten Probolinggo	DPRD Kabupaten	-	-	-
63	DPRD Kabupaten Sampang	DPRD Kabupaten	-	-	-
64	DPRD Kabupaten Sidoarjo	DPRD Kabupaten	-	-	-
65	DPRD Kabupaten Situbondo	DPRD Kabupaten	-	-	-
66	DPRD Kabupaten Sumenep	DPRD Kabupaten	-	-	-
67	DPRD Kabupaten Trenggalek	DPRD Kabupaten	-	-	-
68	DPRD Kabupaten Tuban	DPRD Kabupaten	-	-	-
69	DPRD Kabupaten Tulungagung	DPRD Kabupaten	-	-	-
70	DPRD Kota Batu	DPRD Kota	-	-	-

# Evaluasi Pengelolaan JDIH di Lingkungan Provinsi Jawa Timur ( 12 November 2019 )

No	Instansi	Kategori Anggota	Website JDIH	INTEGRASI dgn jdihn.go.id	KETERANGAN
71	DPRD Kota Blitar	DPRD Kota	-	-	-
72	DPRD Kota Kediri	DPRD Kota	-	-	-
73	DPRD Kota Madiun	DPRD Kota	-	-	-
74	DPRD Kota Malang	DPRD Kota	-	-	-
75	DPRD Kota Mojokerto	DPRD Kota	-	-	-
76	DPRD Kota Pasuruan	DPRD Kota	-	-	-
77	DPRD Kota Probolinggo	DPRD Kota	-	-	-
78	DPRD Kota Surabaya	DPRD Kota	-	-	-
79	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman	Perpustakaan Hukum	-	-	-
80	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri	Perpustakaan Hukum	-	-	-

# Evaluasi Pengelolaan JDIH di Lingkungan Provinsi Jawa Timur ( 12 November 2019 )

No	Instansi	Kategori Anggota	Website JDIH	INTEGRASI dgn jdihn.go.id	KETERANGAN
81	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan	Perpustakaan Hukum	-	-	-
82	Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi	Perpustakaan Hukum	-	-	-
83	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	Perpustakaan Hukum	-	-	-
84	Universitas 45 Surabaya	Perpustakaan Hukum	-	-	-
85	Universitas Abdurachman Saleh	Perpustakaan Hukum	-	-	-
86	Universitas Airlangga	Perpustakaan Hukum	-	-	-
87	Universitas Bakti Indonesia	Perpustakaan Hukum	-	-	-
88	Universitas Bhayangkara Surabaya	Perpustakaan Hukum	-	-	-
89	Universitas Bojonegoro	Perpustakaan Hukum	-	-	-
90	Universitas Bondowoso	Perpustakaan Hukum	-	-	-

# Evaluasi Pengelolaan JDIH di Lingkungan Provinsi Jawa Timur ( 12 November 2019 )

No	Instansi	Kategori Anggota	Website JDIH	INTEGRASI dgn jdihn.go.id	KETERANGAN
91	Universitas Brawijaya	Perpustakaan Hukum	-	-	-
92	Universitas Darul ulum	Perpustakaan Hukum	-	-	-
93	Universitas Dr Soetomo	Perpustakaan Hukum	-	-	-
94	Universitas Gresik	Perpustakaan Hukum	-	-	-
95	Universitas Hang Tuah	Perpustakaan Hukum	-	-	-
96	Universitas Islam Balitar	Perpustakaan Hukum	-	-	-
97	Universitas Islam Darul `ulum	Perpustakaan Hukum	-	-	-
98	Universitas Islam Jember	Perpustakaan Hukum	-	-	-
99	Universitas Islam Kadiri	Perpustakaan Hukum	-	-	-
100	Universitas Islam Lamongan	Perpustakaan Hukum	-	-	-

# Evaluasi Pengelolaan JDIH di Lingkungan Provinsi Jawa Timur ( 12 November 2019 )

No	Instansi	Kategori Anggota	Website JDIH	INTEGRASI dgn jdihn.go.id	KETERANGAN
101	Universitas Islam Madura	Perpustakaan Hukum	-	-	-
102	Universitas Islam Malang	Perpustakaan Hukum	-	-	-
103	Universitas Jember	Perpustakaan Hukum	-	-	-
104	Universitas Kediri	Perpustakaan Hukum	-	-	-
105	Universitas Kanjuruhan	Perpustakaan Hukum	-	-	-
106	Universitas Kartini	Perpustakaan Hukum	-	-	-
107	Universitas Katolik Darma Cendika	Perpustakaan Hukum	-	-	-
108	Universitas Katolik Widya Karya	Perpustakaan Hukum	-	-	-
109	Universitas Kristen Cipta Wacana	Perpustakaan Hukum	-	-	-
110	Universitas Lumajang	Perpustakaan Hukum	-	-	-

# Evaluasi Pengelolaan JDIH di Lingkungan Provinsi Jawa Timur ( 12 November 2019 )

No	Instansi	Kategori Anggota	Website JDIH	INTEGRASI dgn jdihn.go.id	KETERANGAN
111	Universitas Maarif Hasyim Latif	Perpustakaan Hukum	-	-	-
112	Universitas Madura	Perpustakaan Hukum	-	-	-
113	Universitas Mayjen Sungkono	Perpustakaan Hukum	-	-	-
114	Universitas Merdeka Madiun	Perpustakaan Hukum	-	-	-
115	Universitas Merdeka Malang	Perpustakaan Hukum	-	-	-
116	Universitas Merdeka Pasuruan	Perpustakaan Hukum	-	-	-
117	Universitas Merdeka Ponorogo	Perpustakaan Hukum	-	-	-
118	Universitas Merdeka Surabaya	Perpustakaan Hukum	-	-	-
119	Universitas Mochammad Sroedji	Perpustakaan Hukum	-	-	-
120	Universitas Muhammadiyah Jember	Perpustakaan Hukum	-	-	-

# Evaluasi Pengelolaan JDIH di Lingkungan Provinsi Jawa Timur ( 12 November 2019 )

No	Instansi	Kategori Anggota	Website JDIH	INTEGRASI dgn jdihn.go.id	KETERANGAN
121	Universitas Muhammadiyah Malang	Perpustakaan Hukum	-	-	-
122	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	Perpustakaan Hukum	-	-	-
123	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Perpustakaan Hukum	-	-	-
124	Universitas Muhammadiyah Surabaya	Perpustakaan Hukum	-	-	-
125	Universitas Narotama	Perpustakaan Hukum	-	-	-
126	Universitas Negeri Surabaya	Perpustakaan Hukum	-	-	-
127	Universitas Panca Marga	Perpustakaan Hukum	-	-	-
128	Universitas Pelita Harapan Surabaya	Perpustakaan Hukum	-	-	-
129	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	Perpustakaan Hukum	-	-	-
130	Universitas Soerjo	Perpustakaan Hukum	-	-	-

# Evaluasi Pengelolaan JDIH di Lingkungan Provinsi Jawa Timur ( 12 November 2019 )

No	Instansi	Kategori Anggota	Website JDIH	INTEGRASI dgn jdihn.go.id	KETERANGAN
131	Universitas Sunan Bonang	Perpustakaan Hukum	-	-	-
132	Universitas Sunan Giri	Perpustakaan Hukum	-	-	-
133	Universitas Surabaya	Perpustakaan Hukum	-	-	-
134	Universitas Teknologi Surabaya	Perpustakaan Hukum	-	-	-
135	Universitas Trunojoyo	Perpustakaan Hukum	-	-	-
136	Universitas Tulungagung	Perpustakaan Hukum	-	-	-
137	Universitas Widya Gama	Perpustakaan Hukum	-	-	-
138	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Perpustakaan Hukum	-	-	-
139	Universitas Wijaya Putra	Perpustakaan Hukum	-	-	-
140	Universitas Wiraraja	Perpustakaan Hukum	-	-	-



# Kunjungi / Hubungi Kami :



Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Jalan Mayjen Sutoyo No. 10  
Cililitan – Jakarta Timur



[jdihn@bphn.go.id](mailto:jdihn@bphn.go.id)



Reinal Saputra, S.H., M.H. (082111153549)

# Khazanah Dokumen Hukum Indonesia



[jdihn.go.id](http://jdihn.go.id)